

## Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Aji Ratna Kusuma

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman

**Abstract:** *This research aims to find out to what extent the program of subsidized rice for the needs of Sambutan Sub-district Samarinda has been successful. It is measured by effectiveness, efficiency, sufficiency, distribution, responsiveness, and accuracy and based on those criteria the recommendations for future policy can be formulated.*

**Keywords:** *“Policy Evaluation, Subsidized Rice Program”*

**Abstrak:** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan Pelaksanaan Program Beras Miskin Oleh Pemerintah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda, ditinjau dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan agar nantinya hasil evaluasi ini dapat memberikan penilaian dan rekomendasi /saran terhadap perbaikan program kegiatan ini kedepannya.*

**Kata Kunci :** *“Evaluasi Kebijakan, Program Beras Miskin,”*

Kemiskinan/keterbelakangan adalah persoalan yang seringkali muncul bersamaan dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan, apakah kemiskinan sebagai alasan untuk bangkit dan keluar melalui pembangunan atau seringkali pula kemiskinan itu muncul bersamaan dengan kemajuan pembangunan.

Kemiskinan sering digambarkan sebagai ketidak mampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang dan perumahan yang layak akibat dari rendahnya produktifitas dan pendapatan serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang bisa diakses karena tidak adanya keterampilan (skill) serta rendahnya kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau berwirausaha.

Ukuran kemiskinan yang dipakai di Indonesia menurut Suyanto. B (2013) yaitu sembilan bahan pokok hidup yang senantiasa dijaga jangan sampai harganya membumbung tinggi hingga tidak terbeli oleh sebagian besar rakyat, pun supaya jumlahnya di pasar bebas cukup banyak. Apabila ada rumah tangga tertentu yang terus menerus tidak mampu mencukupi keperluan bahan pokok menurut ukuran tertentu, maka rumah tangga itu dianggap miskin.

Persoalan kemiskinan masyarakat tentu saja menjadi bagian tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Banyak program yang telah dijalankan pemerintah dalam upaya membantu masyarakat miskin minimal bisa bertahan hidup baik program berupa santunan atau pemberian maupun program-program pemberdayaan seperti PNPM serta pemberdayaan UMKM.

Program pemberdayaan memerlukan waktu yang lama dan tidak bisa memberikan hasil seketika sementara persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin menyangkut pangan harus diatasi dengan program-program yang bisa segera memenuhi kekurangan pangan khususnya beras. Oleh sebab itu melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2008 pemerintah mengeluarkan program Kebijakan

Perberasan. Salah satu ketetapan dalam Inpres ini adalah : Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selain kebijakan dalam bentuk Inpres tahun 2009 pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 5 peraturan ini menyebutkan : program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih.

Agar pelaksanaan penyaluran beras miskin bisa mencapai sasaran secara tepat pemerintah mengatur pelaksanaannya melalui pedoman umum beras miskin yang digunakan sebagai acuan didalam pelaksanaan. Dalam pedoman penyaluran Beras Miskin tahun 2015 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 tahun 2015 disebutkan bahwa tujuan Program Beras Miskin adalah : untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Yang menjadi sasaran dari program ini adalah 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan di semua wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat dan swasta. Salah satu wilayah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berupa Penyaluran Beras Miskin pada tahun 2015 adalah wilayah Kecamatan Sambutan. Dengan adanya alokasi anggaran pelaksanaan program dan sasaran rumah tangga yang berhak menerima di Kecamatan Sambutan maka program ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yg terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras dipasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,- / kg dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan manfaat yang akan dicapai diatas maka perlu dilakukan evaluasi apakah pelaksanaan penyaluran beras miskin tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah melalui program ini.

### **Kebijakan Publik dan Evaluasi Kebijakan Publik: Sebuah Kerangka Teoritis**

Robert Eystone (1971) mengemukakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” , sementara itu Thomas R. Dye (1975) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan

tidak dilakukan”. Pengertian diatas memberikan gambaran bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang diambil pemerintah untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu sehingga kebijakan publik terkait erat dengan pengambilan keputusan.

Karena menyangkut obyek yang akan diatur dalam kebijakan maka konsep kebijakan harus mencakup arah tindakan apa yang akan dilakukan secara jelas sehingga tidak ada pengertian yang ambigu dan membuat kebijakan itu semakin tidak jelas. Oleh sebab itu James Anderson dalam Winarno.B (2012) mengemukakan konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, sebab evaluasi yang dilakukan terlalu dini maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan, (Subarsono, 2005).

Pengertian evaluasi kebijakan diatas memberikan petunjuk bahwa evaluasi harus dilakukan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat diketahui manfaat dan dampak kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Winarno. B, (2012) bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. Karena menurut Winarno.B. (2012) secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkait erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan

yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dari sini kita dapat melakukan penilaian apakah program yang dijalankan berhasil ataukah gagal. Suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni pengkhususan (*specification*), pengukuran (*measurement*), analisis, dan rekomendasi.

### **Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik**

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut: Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti.

Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir-akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan publik. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan kebijakan publik. Pertama, evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun tidak memberi makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kedua, evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi tingkat kriminalitas. Ketiga, evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk *policy feedback*, termasuk didalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam system pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan.

Pada sisi yang lain, dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Ada lima dimensi yang akan dibahas di sini. Pertama, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian, mereka atau individu-individu yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, seperti misalnya apakah termasuk kelompok miskin, pengusaha kecil, anak-anak sekolah yang cacat, produsen minyak, atau apapun.

Kedua, kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Kebijakan-kebijakan ini dinamakan eksternalitas atau dampak yang melimpah (*externalities or spillover effects*).

Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang. Untuk menjelaskan dimensi yang ketiga ini, kita dapat mengajukan pertanyaan seperti: Apakah suatu program direncanakan untuk memperbaiki keadaan yang secara langsung untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, menjangkau beberapa atau berapa dasawarsa?.

Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.

Dimensi yang terakhir dari evaluasi kebijakan adalah menyangkut biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Biaya-biaya seperti itu seringkali tidak dipertimbangkan dalam membuat evaluasi-evaluasi kebijakan.

Untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program menurut Dunn (2003) diperlukan adanya kriteria sebagai berikut :

Tabel  
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : Dunn (2003)

Untuk menentukan efektivitas/keberhasilan suatu program/kebijakan menurut Steers (1985) diukur melalui :

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktifitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;

6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekwensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerjasama dengan baik, berkomunikasi dan saling mengkoordinasikan;
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

### **Kebijakan Beras Miskin**

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah melalui Instruksi Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan diantaranya berisi tentang kebijakan subsidi harga beras bagi keluarga miskin. Instruksi Presiden ini diantaranya “menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah”.

Tahun 2009 pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang bertujuan membantu masyarakat miskin melalui Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 1 peraturan ini menyebutkan :

1. Penanggulangan kemiskinan adalah program kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Secara jelas perpres ini juga mengelompokkan tiga bentuk program yang secara lengkap bisa menanggulangi kemiskinan yang meliputi :

1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Mengacu kepada peraturan presiden diatas jelas bahwa program beras miskin masuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Sesuai dengan tujuan program untuk membantu masyarakat miskin maka pemerintah juga mengeluarkan aturan-aturan yang secara teknis mengatur tentang mekanisme penyaluran beras miskin tersebut agar tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat yang berhak.

**Evaluasi Kebijakan Program Beras Miskin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Penerima Program Beras Miskin di Kecamatan Sambutan**

Program Beras Miskin di Kecamatan Sambutan dilaksanakan pada lima kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Makroman,
2. Kelurahan Sambutan,
3. Kelurahan Sindang Sari,
4. Kelurahan Sungai Kapih, dan
5. Kelurahan Pulau Atas.

Dengan demikian penyebaran jumlah rumah tangga yang berhak menjadi penerima Beras Miskin di Kecamatan Sambutan merata disemua kelurahan walaupun jumlahnya bervariasi.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2012-2015 jumlah penerima Raskin di lima kelurahan disajikan pada tabel berikut :

Tabel  
Jumlah Penerima Raskin di Kecamatan Sambutan Berdasarkan Kelurahan Tahun 2012-2015

No	Kelurahan	2012	2013	2014	2015
1	Makroman	471	437	437	437
2	Sambutan	366	366	366	366
3	Sungai Kapih	252	252	252	252
4	Sindang Sari	151	151	151	151
5	Pulau Atas	43	43	43	43
Jumlah		1.346	1.249	1.249	1.249

Sumber Data : Kecamatan Sambutan, 2015

Data diatas menunjukkan jumlah penerima Beras Miskin menurun pada tahun 2013 sampai tahun 2015 dibandingkan tahun 2012. Penurunan ini disebabkan karena

sejumlah keluarga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat seperti kepala keluarga sudah mendapatkan pekerjaan dan menerima pendapatan tetap sehingga dicoret dari daftar penerima berdasarkan mekanisme musyawarah desa/musyawarah kelurahan.

Jumlah penerima terbanyak ada pada Kelurahan Makroman walaupun tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah penerima turun namun kelurahan ini tetap merupakan kelurahan terbanyak penerima Beras Miskin dibandingkan empat kelurahan lainnya.

### **Analisis Evaluasi Kebijakan Penyaluran Program Beras Miskin di Kecamatan Sambutan**

Program beras miskin merupakan program pemerintah dalam rangka ketahanan pangan masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan berlanjut pelaksanaannya sampai tahun 2015. Program ini dirancang pemerintah melalui sharing pembiayaan dari pemerintah pusat yang memberikan subsidi harga beras sehingga sampai di tangan keluarga sasaran hanya sebesar Rp 1.600,-/kg. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda dibebani biaya distribusi dari gudang Dolog sampai di rumah tangga sasaran. *Sharing* pembiayaan ini menggambarkan tanggung jawab bersama pemerintah dalam membantu keluarga miskin meringankan beban ekonomi keluarga melalui pengadaan beras.

Jumlah beras yang diberikan dengan harga murah kepada keluarga sasaran sebanyak 15 kg/KK/bulan walaupun berdasarkan hasil penelitian dilapangan semua keluarga mengatakan jumlah ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan setiap bulan rumah tangga baik rumah tangga anggota keluarganya kecil 3-4 orang apalagi yang anggota keluarganya banyak. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah anggota keluarga penerima beras miskin di Kecamatan Sambutan sebanyak 6-8 orang/rumah tangga.

Evaluasi program ini dilakukan dengan menggunakan enam komponen evaluasi dari William Dunn (2003) yaitu melalui efektivitas program, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Keenam komponen evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar menggali informasi, pengelompokan data dan penyajian data pada bagian terdahulu.

Berdasarkan data dan informasi yang telah disajikan pada penyajian data terdahulu baik data sekunder maupun data primer berupa informasi yang diperoleh dari informan penerima beras miskin analisis disajikan sebagai berikut :

#### **1. Efektivitas Program Beras Miskin**

Efektivitas diartikan sebagai sejauh mana pencapaian tujuan suatu program telah tercapai berdasarkan penggunaan sumber daya dalam prosesnya. Berdasarkan pengertian ini maka untuk mengevaluasi ekeftifitas program beras miskin khususnya di Kelurahan Sambutan terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi tujuan program ini berdasarkan buku pedoman umum yang menjadi acuan pelaksanaan program setiap tahunnya. Pedoman Umum tahun 2015 menyebutkan



bahwa tujuan program ini adalah "mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras".

Berdasarkan tujuan ini data dan informasi dikumpulkan dan sebagaimana telah digambarkan pada bagian penyajian data bahwa sebanyak 1.346 KK tahun 2012, turun menjadi 1.249 KK tahun 2013, tahun 2014 sebanyak 1.249 KK dan tahun 2015 sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.249 KK miskin telah menjadi keluarga sasaran penerima beras miskin di Kecamatan Sambutan.

Penerima beras miskin adalah keluarga yang sudah teridentifikasi memenuhi syarat sebagai penerima yang telah ditentukan secara nasional yaitu kepala keluarga tidak memiliki penghasilan tetap (tidak bekerja), memiliki balita dan memiliki anak usia sekolah sehingga berhak untuk dibantu melalui program ini.

Sesuai tujuannya program ini ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran maka keluarga yang menjadi penerima adalah keluarga yang diidentifikasi miskin sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Agar program ini tepat sasaran maka pemerintah menanggung semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan. Dan oleh sebab itu selain subsidi harga pemerintah melalui Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengalokasikan biaya distribusi agar tidak ada biaya yang dikeluarkan keluarga sasaran selain harga beras Rp 1.600,-/kg. Dengan demikian biaya yang ditanggung keluarga sasaran benar-benar sesuai dengan kemampuan sehingga mereka bisa mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lainnya.

Berdasarkan informasi yang digali dari informan di masing-masing kelurahan dapat diketahui bahwa program ini dirasakan masyarakat sudah membantu meringankan beban pendapatan keluarga. Sebagian kebutuhan pangan terpenuhi dengan harga murah sehingga keluarga sasaran hanya mencari tambahan yang tidak terlalu banyak.

Harga yang harus dibayarkan Rumah Tangga Sasaran ditetapkan sebesar Rp 1.600,-/kg selisih harga beli dengan harga beras dipasar yang disubsidi oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota sudah mampu mengurangi pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS). Jika rata-rata harga beras dipasaran masing-masing daerah Rp 6.000,- - Rp 7.000,-/kg nya maka setiap rumah tangga sasaran bisa mengurangi pengeluaran Rp 4.400,- - Rp 5.400,-/kg dan dikalikan dengan jumlah beras yang diterima maka setiap rumah tangga sasaran akan menghemat pengeluaran sebesar Rp 4.400,- x 15 kg/bulan = Rp 66.000,- atau Rp 81.000,- kalau harga pasar Rp 7000,-. Dengan demikian setiap tahunnya Rumah Tangga Sasaran bisa mengurangi pengeluaran sebesar Rp 792.000,- - Rp 972.000,-. Angka ini cukup signifikan mengurangi beban pendapatan rumah tangga yang tidak menetap.

Pelaksanaan program yang diatur dengan pedoman dan dilindungi oleh berbagai aturan hukum membuat semua pihak yang terlibat baik secara vertikal maupun horizontal bekerja berdasarkan aturan dan selalu dievaluasi sehingga program ini berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Sambutan diketahui bahwa Camat memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program sehingga fungsi pengawasan dan evaluasi selalu dilakukan untuk mengantisipasi kalau terjadi

persoalan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang ditemukan dilapangan menjadi bahan masukan untuk memperbaiki program kedepan sehingga persoalan-persoalan yang timbul tidak berulang terus dan keluarga sasaran bisa menerima beras sesuai jumlah dan kualitas yang telah ditetapkan.

Besarnya selisih harga yang ditanggung pemerintah yang dibebankan pada APBN setiap tahunnya sehingga keluarga sasaran hanya menanggung harga yang sesuai kemampuannya. Dengan cara ini keluarga sasaran menjadi terbiasa bertanggung jawab terhadap keluarganya dan tidak malas karena ada kewajiban yang harus ditanggungnya walaupun kecil nilainya.

Bantuan pemerintah melalui program ini tidak hanya dalam bentuk beras yang murah bahkan sampai biaya distribusi juga menjadi beban pemerintah sehingga beras diterima di rumah masing-masing atau ditingkat RT untuk keluarga sasaran yang terlalu jauh untuk dijangkau dengan kendaraan.

Mengacu kepada beberapa pengertian efektivitas dengan berbagai ukuran penilainya maka dapat diketahui bahwa sesuai dengan tujuan awal, program ini cukup efektif dalam membantu meringankan beban rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga khususnya pemenuhan pangan berupa beras.

## **2. Efisiensi Program Beras Miskin**

Efisiensi diartikan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi juga merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi. Secara ekonomi program ini dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran (APBN dan APBD) yang cukup besar oleh sebab itu efisiensi program ini tidak terlepas dari tercapainya tujuan program beras miskin.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian diperoleh gambaran bahwa umumnya informan keluarga sasaran mengatakan bahwa dilihat dari harga beli yang ditanggung masyarakat memang murah tetapi beras miskin yang diterima tidak menyelesaikan masalah pangan keluarga karena jumlahnya yang hanya mencukupi sebagian kebutuhan rumah tangga sasaran, bahkan untuk keluarga dengan jumlah anggota yang besar jumlah 15 kg/bulan hanya mencukupi sepertiga kebutuhan mereka sehingga kekurangannya masih harus ditutupi dengan membeli beras dipasar dengan harga normal.

Banyaknya rumah tangga sasaran tahun 2015 misalnya sebanyak 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), disisi lain sumber daya yang terlibat di semua level pemerintahan hanya mampu menyelesaikan sebagian kecil persoalan pemenuhan pangan keluarga miskin sehingga program ini kurang efisien menyelesaikan persoalan pangan keluarga sasaran/keluarga miskin.

Berdasarkan penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia yang terlibat dan bersifat lintas sektor maupun sumber dana untuk pembiayaan mulai dari pembelian beras sampai distribusi kepada rumah tangga sasaran dan banyaknya rumah tangga sasaran yang harus dibantu membuat program ini belum efisien dalam menyelesaikan persoalan masyarakat miskin.

## **3. Kecukupan Program Beras Miskin**

Kecukupan program dinilai dari seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Pangan adalah merupakan kebutuhan dasar semua manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi UUD tahun 1945. Untuk bertahan hidup setiap orang bertanggung untuk memenuhinya agar keluarga bisa bertahan hidup. Kebutuhan pokok pangan utama masyarakat adalah beras yang menjadi makanan pokok setiap orang dan tidak bisa digantikan dengan jenis pangan lainnya khususnya bagi mereka yang mengkonsumsi beras.

Menurut data statistik tahun 2013, 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun. Menurut BPS tahun 2013 jumlah konsumsi Indonesia jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yaitu 60 kg/kapita/tahun.

Bagi keluarga yang masuk dalam kategori miskin (yaitu mereka yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap) memenuhi kebutuhan pokok utamanya bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dengan penghasilan yang kecil sementara kebutuhan pangan tidak bisa ditunda dan harga beras dipasar selalu naik. Hal ini membuat umumnya keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya dan jika dibiarkan akan berdampak pada banyak hal misalnya kesehatan dan kemampuan bertahan hidup dan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

Dengan pola *sharing* melalui subsidi harga beras yang ditanggung pemerintah sampai distribusi ke rumah tangga sasaran program ini belum memecahkan masalah keluarga sasaran sepenuhnya. Walaupun keluarga sasaran merasa terbantu dengan program ini sebagaimana yang diungkapkan melalui wawancara dengan informan namun masalah pangan keluarga belum teratasi sepenuhnya mengingat sebagian kebutuhan beras ditanggung masyarakat dengan harga sesuai pasar yang selalu mengalami kenaikan sehingga sering tidak terjangkau masyarakat miskin.

Sehingga dengan demikian program ini baru menyelesaikan sebagian persoalan pangan masyarakat dan pada dasarnya masalah pangan masih dirasakan oleh keluarga miskin.

Oleh sebab itu program ini hanya bisa membantu meringankan beban keluarga sasaran namun persoalan kebutuhan pangan keluarga masih tetap merupakan beban setiap rumah tangga miskin terlebih rumah tangga yang anggota keluarganya besar.

#### **4. Pemerataan Program Beras Miskin**

Distribusi beras miskin hanya dilakukan terhadap keluarga sasaran yang telah terdaftar di kelurahan masing-masing dan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan (di Kecamatan Sambutan), data yang digunakan adalah data yang dibuat tahun 2011 sehingga dilihat dari jumlah keluarga yang teridentifikasi sebagai keluarga sasaran dan terdaftar semuanya menjadi penerima beras miskin.

Tidak semua keluarga miskin masuk dalam daftar penerima manfaat karena penambahan jumlah keluarga miskin setelah tahun 2011 tidak berhak menerima beras miskin. Sistem pendataan yang tidak fleksibel membuat sejumlah keluarga miskin sekalipun memenuhi kriteria yang ditentukan tidak serta merta bisa masuk dalam daftar yang sudah baku.

Berdasarkan sistem pendataan tersebut maka distribusi beras miskin dilakukan berdasarkan kuota karena pagu setiap tahunnya ditentukan tetap berdasarkan data tahun 2011. Sementara itu perubahan jumlah keluarga miskin di masyarakat bisa terjadi tanpa bisa diprediksi misalnya akibat PHK atau akibat lainnya tetapi tidak bisa serta merta menjadi penerima manfaat.

Penggantian bisa dilakukan apabila ada keluarga sasaran teridentifikasi tidak berhak menjadi penerima manfaat lagi misalnya sudah mendapatkan pekerjaan, maka keluarga miskin lainnya bisa menggantikan melalui musyawarah kelurahan.

Berdasarkan aturan sistem kuota yang diterapkan selama ini maka manfaat program belum merata diterima semua keluarga miskin karena hanya diterima oleh keluarga sasaran yang sudah ada dalam data base.

Data base penerima beras miskin juga tidak di update setiap tahun sementara perubahan kondisi masyarakat dari mampu menjadi miskin bisa terjadisetiap saat dan tidak serta merta bisa dibantu melalui program ini. Sementara itu masyarakat penerima yang berstatus miskin tidak mudah untuk keluar dan melepaskan diri dari status miskin sehingga tidak serta merta bisa keluar dari daftar penerima untuk digantikan oleh keluarga lain yang tidak terdaftar. Artinya status miskin bisa bertahan lama pada masyarakat dan sulit untuk keluar dari statusnya untuk mengurangi beban pemerintah melalui program ini.

## **5. Responsivitas Program Beras Miskin**

Kebijakan memberikan subsidi beras miskin secara umum belum mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin sehingga mereka belum bisa keluar dari kondisi kemiskinan.

Besarnya jumlah keluarga miskin yang harus dibantu pemerintah membuat efisiensi program ini menjadi kurang mengingat manfaat yang diterima keluarga sasaran dibandingkan dengan besarnya sumber daya yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan program ini.

Rata-rata keluarga miskin baru bisa teratasi sebagian kecil kebutuhannya melalui program ini sementara kebutuhan pangan lainnya masih terlalu banyak yang harus mereka penuhi dengan hanya mengandalkan penghasilan yang tidak menetap.

Responsivitas menurut William N. Dunn (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Mengacu kepada pendapat tersebut pemerintah sudah berupaya membuat program yang cukup baik untuk merespon kebutuhan mendasar masyarakat miskin dalam bentuk memberi bantuan subsidi beras sehingga keluarga sasaran hanya membayar dengan harga yang terjangkau dan diberikan dalam jumlah yang sama yaitu 15 kg/bulan/KK dengan harga beli hanya sebesar Rp 1.600,-/kg nya.

Jumlah yang dialokasikan pemerintah memang jauh dari mencukupi kebutuhan keluarga sasaran namun demikian jumlah ini bisa membantu mengurangi beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Semua informan yang diteliti menyebutkan jumlah ini hanya mampu mencukupi sebagian dari

kebutuhan beras keluarga mereka sehingga informan mengatakan belum sepenuhnya membantu.

Patut dihargai program ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yaitu beras. Kepedulian pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat diharapkan dapat membantu keluarga sasaran untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga karena pada dasarnya mereka yang menjadi keluarga sasaran adalah keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap dan bekerja serabutan bahkan ada yang menyandang status pengangguran.

#### **6. Ketepatan Program Beras Miskin**

Dalam pedoman umum yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan beras miskin, pemerintah sudah berupaya agar program ini tepat untuk menyelesaikan masalah kebutuhan pangan masyarakat khususnya keluarga miskin rawan pangan. Enam T yang digunakan untuk mengevaluasi program ini meliputi : Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi.

Tepat yang pertama dalam program ini adalah tepat sasaran yaitu sejauh mana program diberikan kepada yang memang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sehingga berhak menjadi penerima manfaat. Untuk itu melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan bekerjasama dengan BPS dan berdasarkan musyawarah kelurahan ditetapkan keluarga sasaran ditingkat RT. Mekanisme ini ditempuh agar keluarga sasaran yang ditetapkan adalah berdasarkan data BPS dan ditetapkan melalui musyawarah.

Mereka yang sudah masuk dalam daftar penerima tidak bisa digantikan dengan yang lain kecuali yang bersangkutan menyatakan berhenti atau yang bersangkutan sudah memperoleh pekerjaan tetap sehingga tidak berhak lagi menjadi keluarga sasaran. Penetapan keluarga sasaran secara tepat dalam hal ini dilakukan dengan mekanisme yang transparan agar hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dan apa yang menjadi tujuan program ini bisa tercapai.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan diketahui bahwa lima kelurahan yang ada sudah mendistribusikan beras miskin kepada keluarga sasaran yang tepat yaitu keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap, memiliki tanggungan balita dan anak usia sekolah. Namun demikian karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah dibanding dengan jumlah keluarga miskin yang harus dibantu membuat program ini hanya bisa dinikmati oleh keluarga yang sudah terdaftar sehingga sewaktu-waktu terjadi musibah ada keluarga yang terpaksa kehilangan pekerjaannya maka tidak serta merta bisa masuk daftar penerima beras miskin.

Sistem kuota yang ditetapkan oleh pemerintah ditinjau dari aspek tertib administrasi dan menghindari jumlah yang bisa berubah setiap waktu memang tidak serta merta bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin lainnya. Namun demikian pemerintah sudah berupaya untuk tertib administrasi yang didasarkan pada penggunaan pagu anggaran tetap setiap tahunnya.

Ditinjau dari kuantitas, jumlah yang diberikan kepada keluarga sasaran belum tepat untuk mencukupi kebutuhan pangan semuanya mengingat jumlah tersebut

hanya mampu membantu sebagian kebutuhan dan sebagian lagi harus dipenuhi dengan membeli beras dipasar dengan harga normal/harga sesuai pasar.

Kualitas beras yang disalurkan juga terkadang tidak bisa dikonsumsi sehingga keluarga sasaran harus mengolah kembali melalui penggilingan ulang agar layak dikonsumsi. Semua informan mengatakan pernah menerima beras yang kurang layak dikonsumsi walaupun berapa kali jumlahnya informan mengatakan tidak ingat tapi pernah.

Tepat kualitas bukan berarti beras yang disalurkan sesuai harga yang dibeli keluarga sasaran. Jumlah yang dibayar keluarga sasaran adalah selisih harga yang ditetapkan Dolog dengan yang dibayar pemerintah sehingga harusnya beras yang sampai kepada keluarga sasaran adalah beras dengan kualitas harga yang sesuai dengan harga yang diterima oleh Dolog bukan kualitas harga Rp 1.600,-.

Rendahnya kualitas beras yang disalurkan juga ditentukan oleh waktu penyaluran oleh sebab itu tepat waktu menjadi bagian ukuran ketepatan program sehingga kualitas beras yang sampai kepada keluarga sasaran layak konsumsi dan sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Kesepakatan waktu penyaluran adalah kesepakatan antara pemerintah kelurahan dengan keluarga sasaran. Pada umumnya kecamatan atau kelurahan tidak memiliki gudang penyimpanan yang aman sehingga menurut Camat Sambutan selain waktu yang telah diatur dalam regulasi penyaluran yang penting adalah kesepakatan antara keluarga sasaran dengan pemerintah dalam hal ini kelurahan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut waktu penyaluran disepakati setiap bulan, setiap dua bulan atau setiap tiga bulan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas beras yang akan disalurkan walaupun keluarga sasaran harus membayar sekaligus tiga bulan dalam waktu yang bersamaan.

Keterkaitan antara kapasitas penampungan pemerintah kelurahan, keinginan untuk mempertahankan kualitas beras yang akan disalurkan dan kemampuan masyarakat membayar sekaligus tiga bulan membuat program ini masih harus dievaluasi kedepannya agar tujuan awal program yang diinginkan pemerintah bisa efektif.

Tupoksi Camat dalam program ini adalah melakukan evaluasi dan pengawasan mekanisme pelaksanaan lapangan baik penyaluran maupun ketepatan penerima. Tidak adanya peluang untuk menambah jumlah penerima setiap saat sehingga yang bisa dilakukan adalah mengawasi keluarga penerima dan ketika ia sudah mendapat pekerjaan dan melapor maka penggantian nama keluarga sasaran dilakukan melalui mekanisme musyawarah kelurahan.

Mekanisme yang diatur ini mengindikasikan adanya ketepatan administrasi sehingga tidak bisa dilakukan penggantian tanpa melalui proses yang sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan. Koordinasi antara camat dengan pemerintah kelurahan memudahkan untuk melakukan pengawasan dan memungkinkan pelaksanaan program yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan pemerintah. Peraturan yang sudah dibuat diharapkan mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran dan penyimpangan lainnya di lapangan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan melalui evaluasi kegiatan program yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tujuan program untuk membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga sasaran melalui bantuan subsidi beras untuk keluarga miskin cukup efektif karena bantuan sebanyak 15kg/KK/bulan mampu mengurangi sebagian kebutuhan rumah tangga sasaran sehingga kebutuhan dasar pangan rumah tangga sasaran sebagian teratasi melalui program ini.
2. Banyaknya jumlah rumah tangga sasaran dan banyaknya instansi pemerintah yang terlibat baik horizontal maupun vertikal, besarnya alokasi anggaran yang diberikan untuk subsidi beras dibandingkan dengan penyelesaian persoalan kebutuhan rumah tangga sasaran program ini belum efisien menyelesaikan masalah keluarga sasaran.
3. Hasil evaluasi menunjukkan program baru mampu menyelesaikan sebagian masalah keluarga sasaran karena kebutuhan beras rumah tangga dengan jumlah anggota 4-8 orang sebesar 25-30 Kg sementara beras yang disalurkan hanya 15 kg sehingga persoalan pangan keluarga miskin baru tercukupi sebagian dan sebagiannya lagi menjadi tanggungan keluarga dengan penghasilan yang terkadang tidak mampu memenuhinya.
4. Distribusi beras miskin dilakukan merata hanya kepada keluarga yang sudah terdaftar sementara keluarga miskin lainnya yang tidak masuk dalam daftar penerima tidak bisa menjadi keluarga penerima manfaat sehingga tidak berhak penerima beras miskin.
5. Sistem pendataan yang tidak fleksibel dan tidak di update setiap tahun menyebabkan program ini tidak merata kepada semua keluarga miskin sekalipun mereka memenuhi karakteristik sebagai penerima.
6. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program Beras Miskin belum memuaskan kebutuhan keluarga sasaran baik dilihat dari kuantitas, kualitas maupun waktu penyaluran.
7. Enam T yang dievaluasi meliputi Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi memberikan gambaran sebagai berikut :

Tepat sasaran sudah terlaksana karena dengan evaluasi terus menerus semua yang menerima program adalah mereka yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sudah masuk dalam daftar penerima.

Tepat harga juga dirasakan keluarga penerima sudah sangat sesuai dengan penghasilan mereka sehingga semua informan menyebutkan sangat terbantu dengan harga Rp 1.600,-/kg. Namun demikian secara kuantitas belum memenuhi harapan semua keluarga sasaran karena jumlah yang diterima masih belum cukup bagi keluarga sehingga harus ditambah dengan membeli sesuai harga di pasar yang tentu saja seringkali tidak terjangkau keluarga miskin.

Mutu beras yang diterima keluarga sasaran terkadang masih kurang layak dikonsumsi sehingga masyarakat harus menyiasati dengan cara menggiling kembali agar layak konsumsi. Seharusnya kualitas yang diterima adalah kualitas dengan harga yang dibayar ditambah harga subsidi pemerintah sehingga

harusnya kualitas yang diterima adalah beras dengan kualitas sedang bukan kualitas rendah.

Berdasarkan waktu distribusi dari Dolog seharusnya keluarga sasaran bisa menerima setiap bulan. Namun tidak adanya gudang penyimpanan di kelurahan maka distribusi dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga sasaran dengan pihak kelurahan sehingga bisa dilakukan setiap bulan, dua bulan atau sekaligus tiga bulan. Sekalipun merupakan hasil kesepakatan sistim distribusi ini terkadang memberatkan keluarga sasaran karena harus membayar tiga bulan sekaligus dan beras pun bisa habis dikonsumsi sehingga menunggu tiga bulan ke depan juga merupakan persoalan bagi keluarga sasaran.

Keterlibatan berbagai instansi yang terkait langsung sampai pada level kelurahan sehingga penerima tepat sasaran, pengawasan mudah dan sistim pendataan yang tidak fleksibel walaupun mengurangi hak keluarga miskin lainnya namun tepat untuk mengurangi penyimpangan dan kebocoran di lapangan.

Jumlah penerima beras miskin atau keluarga sasaran yang sama selama tiga tahun terakhir mengindikasikan jumlah keluarga miskin di setiap kelurahan masih tetap dan kemungkinan bertambah karena ada sejumlah keluarga yang memenuhi syarat sebagai keluarga sasaran tapi tidak masuk daftar penerima karena pagu beras miskin yang disalurkan tidak ada peningkatan setiap tahunnya.

## **Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan program beras miskin diperoleh berbagai hal yang perlu diperbaiki agar tujuan program bisa benar-benar efektif menyelesaikan persoalan pangan masyarakat. Adapun saran yang dapat dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sistem pendataan yang diperbaharui dalam kurun waktu yang lama menyebabkan sebagian keluarga miskin yang harusnya dibantu sehingga program ini bisa berkeadilan hendaknya diganti dengan pendataan yang lebih fleksibel dan dilakukan setiap enam bulan atau paling lama satu kali setiap tahun sehingga bisa cepat mengakomodir keluarga yang tiba-tiba menjadi miskin karena sebab yang tidak bisa dihindari.
2. Jumlah beras yang diterima belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga khususnya keluarga yang anggotanya banyak. Oleh sebab itu disarankan agar pemberian bantuan disesuaikan dengan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan sehingga beban keluarga bisa berkurang dan penghasilan lainnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
3. Masih adanya beras yang disalurkan dengan kualitas yang kurang layak konsumsi disarankan agar pengawasan pada setiap jenjang distribusi terutama pada saat diterima dari Dolog harus terus diperketat mengingat harga beras yang diterima masyarakat adalah beras subsidi bukan beras seharga yang dibayarkan.
4. Tidak tersedianya gudang penyimpanan yang layak di kecamatan maupun di kelurahan sering menjadi penyebab distribusi dilaksanakan sesuai kesepakatan



yang tidak sesuai dengan aturan oleh sebab itu disarankan agar jalur distribusi dipangkas menjadi langsung dari Dolog kepada keluarga sasaran sehingga kualitas beras dan biaya distribusi juga bisa dikurangi.

5. Sistem antrean keluarga miskin untuk masuk dalam daftar keluarga sasaran menunggu keluarga yang terdaftar di daftar penerima keluar karena alasan tidak memenuhi kriteria keluarga sasaran menjadi penyebab ketidakadilan bagi keluarga yang tidak terdaftar oleh sebab itu disarankan agar dilakukan pemantauan terus menerus dan pemberian keterampilan keluarga miskin melalui pemberian modal usaha agar bisa mandiri dan tidak terus menerus menjadi keluarga sasaran program.

### Daftar Pustaka

- Anonim, Instruksi Presiden No. 8 tahun 2008 tentang *Kebijakan Perberasan*.  
\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang *Ketahanan Pangan*.  
\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden No. 13 tahun 2009 tentang *Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*.  
\_\_\_\_\_, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 tahun 2014 tentang *Pedoman Beras Miskin Tahun 2015*.
- Anderson, James. 1975. *Public Policy Making*. Second Edition. New York: Holt, Rinehart And Wiston.
- Dunn, 2003. William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Second Edition. Englewood Cliff, N.J : Prentice-Hall.
- Eyestone, Robert. 1971. *The Theads of Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Hall.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, B. 1995. *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Penerbit CAPS.